

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Sakti Ramdhon, 2020. *Perundang-Undangan Indonesia; Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya*, CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Abdy Yuhana, 2013. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Fokus Media. Bandung.
- Achmad Ali, 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal teori) dan Teori Peradilan (Legal Prudence)*. Kencana. Jakarta.
- Achmad Ruslan, 2013. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Ade Irawan et al., 2014. *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*. Indonesia Corruption Watch (ICW). Jakarta.
- Agus Anjar, 2019. *Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial*, Deepublisher, Yogyakarta.
- Ahmad Redi, 2017. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers. Depok.
- Ani Purwati, 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jagad Media Publishing.
- Asiz Setyagama, 2017. *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Badriyak Khaleed, *Legislatif Drafting, Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-Undangan*.
- Dahlan Sinaga, 2021. *Tindak Pidana Pemilu: Penegakan Hukum Pidana Pemilu*. Nusa Media. Bandung.
- Dian Aries Mujiburohman, 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Press, Sleman.

- Edi Ribus Herwanto, 2019. *Politik Hukum Pidana*. Sai Wawawi Publishing. Bandar Lampung.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana. Jakarta.
- Harsanto Nursadi, 2008. *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta.
- Herlina Sari, 2019. *Wajah Demokrasi Indonesia Pasca Pelantikan Hasil Pemilu 2019*, Lemah Media Pustaka, Bandung.
- Heru Nugroho, 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Pustaka pelajar. Yogyakarta.
- Ikhasan Ahmad, 2015. *Pilar Demokrasi Kelima Politik Uang: Studi Kualitatif di Kota Serang Banteng*, deepublish. Yogyakarta.
- Irvan Mawardi dan Muhammad Jufri, 2021. *Keadilan Pemilu: Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu*. Pustaka Ilmu. Yogyakarta.
- Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Isharyanto, 2016. *Politik Hukum*. Bebuku Publisher. Surakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2019. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. (terjemahan M. Khozim) Nusa Media. Bandung.
- Lukman Santoso Az, 2016. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. IAIN Po Press. Ponorogo.
- M. Solly Lubis, 2014. *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*, Bandung. Mandar Maju.
- Maria Farida Indrati S, 2020. *Ilmu Perundang-Undangan 2*. PT. Kansius, Yogyakarta.
- Maroni, 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana, Aura* (CV. Anugrah Utama Rahardja). Bandar Lampung.
- Miriam Budiarmo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 2010. *Perdebatan hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers. Jakarta.

-----, 2017. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rajawali Pers. Indonesia.

-----, 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers. Jakarta.

Nanda Dwi Rizkia, 2020. *Politik hukum Kerja Sama Penelitian Asing*. P.T. Alumni; Bandung.

Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta.

Panjuli Wiranggi, 2017, *Demokrasi*, Relasi Inti Media; Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

Prayudi, Ahmad Budiman dan Aryojati Ardipandanto, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jakarta.

Ratna Dewi Pettalolo dan Khairul Fahmi, 2020. *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Jakarta.

Sajipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014.

Syamsuddin Radjab, 2013, *Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Nagamedia. Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2019 *Sistem Hukum Pancasila; (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia) Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusa Media. Bandung.

Yuheslon, 2018, *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Zahir Publishing: Yogyakarta.

Zainal Abidin Rahawarin Darma, 2022. *Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Penata Aksaran, Yogyakarta.

Jurnal

Boy Anugerah, *Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat*, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 33, 2018.

- Dairani. Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya *money politic* Pemilu Legislatif, Vol.1 No. 2, 2021.
- Hariman Satria, Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia, *Integritas*, Vol. 4, No. 1.
- Iza Rumestan “Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No.2, 2014.
- Janpatar Simamora, “Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis” *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No.1.
- Kadek Agus Sudiarawan, Putu Edgar Tanaya dan Bagus Hermanto, Discover the Legal Concept in the Sociological Study, *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 3, Issue 1, 2020.
- Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi dan Dwi Setiawan Chaniago, Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, *RESIPROKAL* Vol. 1, No. 1, 2019.
- Mulida Hayati dan Rico Septian “Korelasi Pilkada Langdung dan Korupsi di Indonesia” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2.
- Ogi Habibi “*Sistem Demokrasi dan Kekhilafan dalam Syariat Islam*” *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Vol. 3 No. 1, 2019.
- Sopyar Paradigma, “Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah hukum Islam dan Hukum Islam” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* Vol. 2, No. 3. 2021.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Lapran Pemilihan Umum.
- Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Orisinalitas Penelitian

Desi Amalia Anwar, *Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majene*, Tesis, 2021, Universitas Hasanuddin, 2022.

Retna Susanti, *Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilu Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Hariman Satria, *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, *Integritas*, Vol. 4, No. 1.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang#:~:text=Politik%20uang%20atau%20politik%20perut,tertentu%20pada%20saat%20pemilihan%20umum

<https://www.democracy.id/2021/01/Bawaslu-Sebut-96-Kasus-Politik-Uang-di-Pilkada-2020-Disetop-Kenapa.html>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10399>

<https://www.suara.com/news/2020/07/02/201935/60-persen-orang-indonesia-masih-anggap-wajar-praktik-politik-uang>

Lain-lain

Sri Wahyuningsih, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar, Wawancara tanggal 4 Oktober 2022.

Abd. Rahman, Komisioner KPU/Devisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Makassar, Wawancara pada tanggal 03 Oktober 2022.

Pengumuman KPU Kota Makassar Nomor: 2074/PL.02.5-Pu/7371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020.

Haedar Djidar, "Hakikat Hak Pilih Pada Pemilu Serentak Berdasarkan Suara Sah Nasional Sebagai Indikator Presidential Threshold" Disertasi Fakultas Hukum Unhas, 2021.

Kementerian dalam Negeri, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.